

Jakarta, 26 Januari 2021

Nomor : S.028/DIR/CSGC/I/2021
Lampiran : 1 (satu) lampiran

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik / Disclosure of Information**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding The Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of The Director of The Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding The Disclosure of Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik <i>/ Name of Issuer or Public Company</i>	: PT Bank BTPN Syariah Tbk
Bidang Usaha / <i>Line of business</i>	: Perbankan Syariah/Sharia Banking
Telepon / <i>Telephone</i>	: 021 – 300 26 400
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: 021 – 292 72 096
Alamat Surat Elektronik (<i>email</i>)	: corsec@btpnsyariah.com

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tanggal Kejadian | : | 25 Januari 2021 / <i>January 25th, 2021</i> |
| 2. Jenis Informasi atau Fakta Material | : | Informasi atau fakta material lainnya –
Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri / <i>Other information or material facts -
Implementation of Partial Transfer of Treasury
Shares</i> |
| 3. Uraian Informasi atau Fakta Material | : | <i>Description of Information or Material Facts</i> |
-
- | | |
|---|--|
| <p>Merujuk kepada Keterbukaan Informasi tanggal 8 Januari 2021 tentang Rencana Pengalihan Sebagian Saham Tresuri PT Bank BTPN Syariah Tbk</p> | <p><i>Referring to the Disclosure of Information dated January 8, 2021 concerning the Plan to Transfer Some Treasury Shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk</i></p> |
| <p>Sebagaimana disampaikan pada Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana disebutkan diatas, PT Bank BTPN Syariah Tbk telah melaksanakan pengalihan sebagian dari saham tresuri tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable untuk Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :</p> | <p><i>As stated in the Disclosure of Information on January 8, 2021 aforesaid, PT Bank BTPN Syariah Tbk has carried out the transfer of a portion of the treasury shares as part of the implementation of variable remuneration for the Board of Directors for the Company's performance for the 2018 financial year as follows:</i></p> |
-
- | | |
|--|---|
| <p>1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri</p> <p>Pengalihan Sebagian Saham Treasuri tersebut telah dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).</p> | <p>1. Partial Transfer of the Treasury Shares</p> <p><i>The transfer of some treasury shares has been carried out outside the Stock Exchange by distributing directly to the parties entitled to variable remuneration of the Company's performance for the 2018 financial year as referred to in POJK No. 30/2017 (Article 24).</i></p> |
| <p>2. Pihak-Pihak Yang Menerima Saham Treasuri</p> <p>Pihak-pihak yang telah menerima alokasi dan pendistribusian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan bagian dari remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut, merujuk Peraturan OJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi yang menjabat</p> | <p>2. The Parties Who Receiving the Treasury Shares</p> <p><i>Parties who have received the allocation and distribution of Treasury Shares ("Receiving Parties") which are part of the variable remuneration of the Company's performance for the 2018 financial year, referring to OJK Regulation No.59/2017 is a Member of the Board of Directors serving in the Company between the period 6 March 2017 to 16 April</i></p> |

di Perseroan di antara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

3. Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri sebagaimana dimaksud diatas yaitu sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, dan telah dialokasikan kepada penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

4. Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Menerima

Saham Treasuri yang telah dialokasikan dan didistribusikan tersebut adalah merupakan bagian dari remunerasi dalam bentuk bonus yang ditangguhkan, dengan demikian saham treasuri yang telah dibagikan pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut, tidak dikenakan *Lock-up*, dan dengan demikian dapat ditransaksi dan dipindah

2020, in accordance with the approval of the Board of Commissioners taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as stated in the Circular Resolution of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 dated January 4, 2021.

This is in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which decides that the implementation of share buybacks in the framework of providing variable remuneration to members of the Board of Directors of the Company, as well as the implementation of remuneration payments of a variable nature must be with the written approval of the Board of Commissioners.

3. Time of Implementation for the Transfer of the Treasury Shares

The transfer of some treasury shares as referred aforesaid amounts to 402,800 (Four Hundred Two Thousand Eight Hundred) shares has been implemented on January 25, 2021, and has been allocated to the Receiving Parties based on the amount of remuneration that is variable on the Company's performance for The Financial Year 2018.

4. Status of the Treasury Shares allocated to the Recipients

Treasury shares that have been allocated and registered are part of the remuneration in the form of deferred bonuses, thus the treasury shares that have been distributed on January 25, 2021, will not be subject to Lock-up, and thus can be transacted and transferred by the Receiving Party, either through trading on the Indonesia Stock Exchange and/or outside the Stock

tanggungan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Exchange.

5. Jumlah Saham Tresuri Perseroan setelah pengalihan saham

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan sebagian saham tresuri sebagaimana dimaksud diatas maka jumlah saham tresuri di Perseroan menjadi sejumlah 2.097.200 (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) lembar saham

5. Number of Treasury Shares of the Company after the transfer of share

Upon the implementation of the transfer of some treasury shares aforesaid, the number of treasury shares in the Company becomes a number of 2.097.200 (Two Million Ninety Seven Thousand Two Hundred) shares

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company* : -
5. Keterangan lain-lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK


Hadi Wibowo
Direktur Utama


Fachmy Achmad
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk
6. PT Datindo Entrycom
7. PT Trimegah Securities Indonesia

PROPERTI TERDAMPAK COVID-19

RUMAH TAPAK TEMPAT BERPIJAK

Teka-teki seberapa cepat pemulihan sektor properti dari dampak buruk pandemi virus corona sepanjang tahun lalu mulai terkuak dengan naiknya jumlah peminat rumah tapak di Indonesia.

Yanita Petriella & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Pada kuartal IV/2020, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (REI) melaporkan peminat rumah tapak atau landed house mulai terlihat setelah kuartal sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan sektor properti khususnya perumahan akan mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan dengan subsektor lainnya.

“Yang paling cepat tumbuh di 2021 adalah penjualan sektor perumahan. Diperkirakan kuartal I saja sudah mulai ada peningkatan,” ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (7/1).

Untuk properti jenis lain seperti apartemen, perkantoran, hotel dan mal, dia memprediksi mengalami pemulihan cukup lama. Perbedaan tersebut disebabkan banyak investor yang lebih memilih menyimpan uangnya daripada membeli properti karena adanya ketidakpastian ekonomi.

Oleh karena itu, dia menilai para pengelola kantor dan mal harus memiliki terobosan agar bisa bertahan. Dia menyarankan pengelola properti komersial mengubah konsep yang akan ditawarkan pada era *new normal*.

Menurutnya, bisnis penyewaan kantor dan mal baru pulih pada 2022. “Sehingga mereka harus berpikir kreatif untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang,” tutur Paulus.

Prediksi pemulihan properti yang dimulai dari perumahan juga disampaikan Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto.

Pada tahun ini, dia menyatakan sektor properti rumah tapak memiliki prospek yang bagus apalagi rumah menjadi salah satu kebutuhan primer.

“Rumah tapak ini kebanyakan *end user* untuk tempat tinggal sehingga prospeknya bagus beda apartemen yang dijadikan investasi sebagian besar,” kata Ferry.

Selain itu, prospek pulihnya properti rumah tapak didorong kemudahan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Adapun, rumah tapak yang paling diminati atau diserap pasar memiliki harga berkisar

antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar.

“Untuk di bawah Rp500 juta ini menengah ke bawah yang juga menunggu kepastian, atau mengalami PHK, pemotongan gaji. Kalau yang Rp2 miliar ke atas juga menunggu kondisi pulih,” ucapnya.

Pandangan sedikit berbeda datang dari CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trangganda. Menurutnya, sektor properti akan mengalami pemulihan mulai semester II/2021 karena sampai dengan semester I/2021 masih belum stabil.

Dia menilai kondisi sektor properti sepanjang tahun ini memang masih belum bisa dipastikan karena banyak variabel yang sangat dinamis.

“Tapi harusnya bisa lebih baik dibandingkan 2020. Karena tahun 2020 aja itu secara tahunan masih turun 32% dibandingkan dari tahun 2019,” ujarnya.

Dia menambahkan sektor properti yang paling cepat mengalami *recovery* yakni untuk perumahan terutama untuk harga Rp500 juta dan Rp1 miliar. Nantinya, segmen rumah jenis itu menjadi penggerak untuk pemulihan.

SEJUTA RUMAH

Sayangnya, pembangunan rumah di Indonesia sering kali tak mencapai target, meskipun dianggap sebagai pendorong pemulihan dari pandemi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan rumah di Indonesia yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah hingga 21 Desember 2020 baru mencapai 902.886 unit rumah.

“Dari data yang kami miliki per tanggal 21 Desember 2020 lalu angka capaian Program Sejuta Rumah telah menembus angka 902.886 unit rumah,” ungkapnya.

Khalawi menjelaskan pembangunan perumahan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Menurutnya, Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015 dan juga menjadi Program Strategis Nasional (PSN) perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pengembangan, perbankan, sektor industri dan masyarakat.

“Yang paling cepat tumbuh di 2021 adalah penjualan sektor perumahan.”



Sektor perumahan, katanya, harus tetap berjalan karena dapat membantu pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19.

Selain itu, pembangunan perumahan yang baik dari sisi kualitas dan layak huni juga dapat membuka lapangan kerja, mendorong kinerja sektor industri sekaligus menjaga kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari terpapar Covid-19.

Dia menjamin pemerintah tetap berupaya mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, meskipun hasil pencapaian pembangunan perumahan mungkin belum mencapai target maksimal yakni 1 juta unit per tahun.

Data Ditjen Perumahan per 21 Desember 2020, jumlah pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah telah mencapai 902.886 unit terdiri atas rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 677.616 unit dan rumah non-MBR sebanyak 225.270 unit.

“Pembangunan rumah untuk MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tercatat 200.881 unit, Kementerian Lain 51.136, pemerintah daerah 33.925 unit,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan perumahan telah membangun rumah 383.033 unit. Pembangunan rumah juga banyak dilaksanakan oleh sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR) sebanyak 3.681 unit dan masyarakat membangun rumah secara mandiri 4.960 unit.

Untuk rumah MBR yang dibangun oleh pengembang sebanyak 178.749 unit dan masyarakat sebanyak 46.521 unit. ■

KEBUTUHAN POKOK

Sektor properti khususnya perumahan bakal pulih paling cepat dibandingkan dengan sektor lain setelah terdampak pandemi Covid-19. Perumahan yang merupakan kebutuhan pokok manusia menjadi alasan utama sektor itu pulih lebih dulu.

Rencana Strategis Pembangunan Rumah Kementerian PUPR 2020-2024 (unit)

Kategori	Jumlah
SMF	50.000
Subsidi BP2BT	100.000
BP Tapera	500.000
Subsidi perumahan FLPP/SSB - SBUM	900.000
Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat	3.450.000

Sumber: RPJMN Kementerian PUPR
SMF: Sarana Multifungsi Finansial, MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah, BP2BT: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Bisnis/lyas



Pencapaian Program Sejuta Rumah Periode 2020

Target	: 1 juta unit
Realisasi	: 902.886 unit*
*)Hingga 21 Desember	

Backlog Perumahan di Indonesia Per 2020 (juta unit)

Rumah untuk MBR non fixed income	6,48
Rumah untuk MBR fixed income	1,72
Rumah untuk non-MBR	0,56
Rumah Tidak Layak Huni	2,36

Sumber: Kementerian PUPR, diolah

PELABUHAN BARU

Pelindo III Jadi Operator Sementara Patimban

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan menunjuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai operator sementara Pelabuhan Patimban, sampai dengan konsorsium pemenang lelang yang dipimpin CT Corp siap mengelola pelabuhan baru tersebut.

Penunjukkan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 351/2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Melaksanakan Pengoperasian Sementara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Desember 2020.

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III telah menunjuk General Manager Pelabuhan Patimban Sandy Syahrial Alam yang sebelumnya menjabat Commercial and Business Development Manager PT Terminal Petikemas Surabaya (TPKS), anak usaha BUMN itu.

Dalam Konsorsium Patimban, TPKS merupakan salah satu anggota bersama PT CT Corp Infrastruktur Indonesia, PT Indika Logistic & Support Services, dan PT U Connectivity Services.

Sandy menyatakan tantangan utama mengelola Pelabuhan patimban adalah pembentukan sistem dan *standard operational procedure* (SOP). “Saya hadapi industri eksklusif sehingga orang-orang bertemu itu lagi itu lagi. Walaupun kita pindah ke Patimban komunitasnya juga itu lagi-itu lagi,” katanya dalam acara *Public Expose* Pelabuhan Patimban, Kamis (7/1).

Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan waktu inap barang atau *dwelling time* di Pelabuhan Patimban hanya kurang dari 2 hari dengan akses yang lebih cepat dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional.

“Patimban dikelola swasta dengan skema KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha] atau PPP [public private partnership] diharapkan dapat memberi layanan prima, mengelola *dwelling time* bisa kurang dari 2 hari, bersamaan dengan pengurangan biaya *tracking* [karena jarak lebih dekat ke industri] dan *dwelling time*, ini akan berkontribusi mengurangi biaya logistik nasional secara signifikan,” kata Budi.

Dengan standar *dwelling time* dan akses yang lebih cepat, pengiriman

kendaraan dari Karawang lebih efisien menuju Pelabuhan Patimban, baik untuk kebutuhan ekspor maupun pengiriman antarpulau.

“Dengan adanya perbaikan itu, disusul terminal peti kemas mendatang, Desember 2021 dapat memulai dan berbagi dengan Tanjung Priok untuk efisiensi biaya dan waktu,” katanya.

Pelabuhan Patimban, kata dia, membuktikan walaupun pandemi Covid-19 melanda, pembangunan di Indonesia tidak terpengaruh.

TAGIH JANJI

Sementara itu, Pemerintah Jepang menagih janji Presiden Joko Widodo membentuk operator bersama Pelabuhan Patimban setelah terpilihnya konsorsium yang dipimpin CT Corp sebagai operator pelabuhan itu.

Minister of Economic Affairs of the Embassy of Japan Tadayuki Miyashita menuturkan Pelabuhan Patimban telah menjadi proyek simbolis hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan itu akan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, termasuk upaya mempromosikan ekspor, menciptakan iklim investasi yang baik, hingga pengalihan teknologi dan pengembangan SDM.

Dia juga menegaskan infrastruktur (*hard infrastructure*) saja tidak cukup untuk meningkatkan daya saing hingga mengurangi biaya dan waktu pengiriman barang.

“Kami tengah menanti agar konsorsium Jepang dan konsorsium Indonesia ini dapat membentuk kerja sama sebagai Indonesia-Jepang *joint operator* dalam waktu dekat, sebagaimana yang sudah disepakati Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Jepang,” katanya.

Dia menegaskan konsorsium Indonesia-Jepang dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelabuhan.

Tadayuki menekankan upaya tersebut hanya dapat terlaksana melalui manajemen operasi pelabuhan itu penting untuk meningkatkan daya saing ekspor. Dia juga menegaskan pentingnya menggaet pelanggan. “Ini penting untuk mendapatkan penilaian yang tinggi dan reputasi yang baik dari pelanggan. Tanpa mereka pelabuhan hanya menjadi harta karun yang tak berguna.” (Rinaldi M. Azka)



KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI PT BANK BTPN SYARIAH TBK

PENDAHULUAN

PT Bank BTPN Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melaksanakan pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 30/2017”), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019.

Jumlah saham yang telah dibeli kembali tersebut (saham treasury) adalah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2020 sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham, dengan biaya perolehan seluruhnya sebesar Rp. 9.763 Juta, dengan demikian harga rata-rata sebesar Rp. 3.905,2 per saham.

Tujuan Pembelian Kembali Saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi melalui Surat Kabar Harian Kompas dan Kontan, situs web Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Juli 2019 adalah dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi atas kinerja Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.59/2017”).

RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI

Perseroan berencana melakukan alokasi dan distribusi sebagian dari saham treasury tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :

- Pengalihan Sebagian Saham Treasury**
Pengalihan Sebagian Saham Treasury dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).
- Pihak-Pihak Yang Akan Menerima Saham Treasury**
Pihak-pihak yang akan menerima alokasi dan pendistribusian Saham Treasury (“Pihak Penerima”) yang merupakan bagian dari remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai Peraturan OJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi yang menjabat di Perseroan di antara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/2021 tanggal 4 Januari 2021. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasury**
Pengalihan Sebagian Saham Treasury yaitu sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, yang dialokasikan berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan harga saham per tanggal 15 Februari 2019 yang telah dikomunikasikan kepada Penerima pada tanggal 14 Februari 2019.
- Status Saham Treasury yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Akan Menerima**
Saham Treasury yang akan dialokasikan dan didistribusikan tersebut adalah merupakan bagian dari remunerasi dalam bentuk bonus yang ditangguhkan, dengan demikian pada saat saham treasury dibagikan pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut, tidak akan dikenakan *Lock-up*, dan dengan demikian dapat ditransaksi dan dipindah tangkankan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Demikian Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 30/2017 (Pasal 23) terkait Keterbukaan Informasi.

Jakarta, 8 Januari 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi